PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI PIDANA POKOK YANG BERBENTUK KUMULATIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

YOGI FIRMANDA JATNIKA PRATAMA

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pidana denda sebagai pidana pokok yang berbentuk kumulatif dalam rumusan ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika. Untuk mengetahui penjatuhan pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar dalam putusan 431/Pid.Sus/2015/PN.Bjm, telah sesuai dengan ketentuan pidana denda dalam undang-undang narkotika. Dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penjatuhan dan penerapan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkotika. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dan teori system hukum. Terdapat tiga komponen hukum yang saling berpengaruh, yakni struktur, substansi dan budaya hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pidana denda sebagai pidana pokok yang berbentuk kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang belum optimal dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika dikarenakan penerapan pidana denda pada pelaksanaannya oleh terpidana tidak dapat dilaksanakan dan digantikan dengan pidan penjara yang menimbulkan ketidakjelasan dalam penafsiran hukm berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Penjatuhan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar terdakwa dalam Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2015/PN.Bjm telah sesuai dengan ketentuan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi ketidakjelasan penafsiran dalam menerapkan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar menimbulkan suatu ketidakpastian hukum itu sendiri. Hambatan-hambatan penerapan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkotika pada pelaksanaan pemidanaan dengan pidana denda karena tidka berjalan optimal dimana terpidana tidak melakukan pidana denda tersebut serta hambatan dalam penerapan Undang-Undang Narkotika yang masih menimbulkan penfasiran yang keliru dari pasal-pasal yang menerapkan pidana secara kumulatif.

IMPLEMENTATION OF FINE CRIMES AS CUMULATIVE FORMED CRIMINALS IN LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS

YOGI FIRMANDA JATNIKA PRATAMA

ABSTRACT

This study was conducted to determine the application of criminal penalties as a cumulative principal in the formulation of criminal provisions in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which can provide a deterrent effect for perpetrators of narcotics crimes. To find out the imposition of imprisonment in lieu of fines that cannot be paid in the decision 431 / Pid.Sus / 2015 / PN.Bjm, it is in accordance with the provisions of criminal fines in the narcotics law. And to find out the obstacles in the imposition and application of criminal penalties for perpetrators of narcotics crimes.

The theory used in this study is the theory of the effectiveness of law and legal system theory. There are three components of law that are mutually influential, namely structure, substance and legal culture.

The research method used in this thesis is normative research. Normative legal research is legal research concerning the application of normative legal provisions (codification, law or contract) in action on any particular legal event that occurs in society.

The results of this study conclude that the application of criminal penalties as a cumulative principal in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics that has not been optimal in providing deterrent effects to perpetrators of narcotics crimes due to the imposition of criminal penalties in the implementation by convicts cannot be implemented and replaced with prison prisoners which cause uncertainty in legal interpretation based on the Narcotics Law. The imposition of imprisonment in lieu of criminal penalties that cannot be paid by the defendant in Decision Number 431 / Pid.Sus / 2015 / PN.Bjm is in accordance with the criminal provisions of fines in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics but the obscurity of interpretation in imposing imprisonment as substitute for criminal penalties that cannot be paid creates a legal uncertainty itself. Barriers to the application of fines to narcotics criminals in the execution of crimes with criminal penalties for not running optimally where the convicts did not commit criminal penalties as well as obstacles in the application of the Narcotics Law which still lead to erroneous interpretation of the articles that apply criminal penalties cumulative.